

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri. Kewenangan ini diberikan kepada daerah otonom, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu. Daerah otonom berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam kerangka sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi negara kesatuan dan sistem pemerintahan sampai dengan tingkat kota.

Salah satu cara untuk mengembangkan daerah adalah dengan menyusun anggaran yang baik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Anggaran merupakan susunan tertulis yang berkaitan dengan kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam suatu organisasi, anggaran memiliki peran penting sebagai rencana keuangan yang disusun secara teratur dan sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan program organisasi. Anggaran sektor pemerintah adalah suatu rencana keuangan untuk memperkirakan pengeluaran dan penerimaan yang ditargetkan di masa depan. Ini dapat dibuat dengan memeriksa data sebelumnya sebagai pedoman penganggaran. Penganggaran sektor pemerintah dimulai saat perumusan strategi selesai, dan merupakan proses politik dalam organisasi sektor pemerintah. Ini karena anggaran harus transparan dan terbuka untuk masyarakat untuk

dikritik, dibahas, dan memberikan masukan. Proses dari penganggaran sektor pemerintah diawali saat perumusan strategi sudah dilakukan (Widowati dan Fatimah, 2022:73).

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas. OPD ini bertugas merealisasikan atau mengimplementasikan rencana kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran atau periode tertentu. Untuk menilai efektivitas realisasi anggaran di OPD, perlu dilakukan perbandingan antara dokumen pelaksana anggaran dengan laporan realisasi anggaran OPD terkait. PP No. 8 Tahun 2006 mendefinisikan laporan realisasi anggaran sebagai laporan yang memaparkan gambaran pendapatan, belanja, pembiayaan, dan realisasi anggaran selama satu tahun anggaran atau periode tertentu.

Kesejahteraan rakyat sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah setelah otonomi daerah diberlakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri, dan ini menandakan keberhasilan otonomi daerah. Sebaliknya, PAD yang rendah menunjukkan otonomi daerah yang belum optimal.

Isu sejak dulu yang sangat penting memang ditekankan sebaiknya ukuran anggaran itu pada *performance days*. Pengukuran kinerja anggaran di Indonesia masih berorientasi pada proses (penyerapan anggaran) dan bukan hasil (pencapaian target). Hal ini menyebabkan inefisiensi dan ketidakefektifan anggaran, di mana anggaran dihabiskan tanpa mencapai hasil yang optimal. Presiden Jokowi ingin mengubah sistem pengukuran kinerja menjadi berorientasi hasil, namun implementasinya di lapangan masih belum optimal. Tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah mengubah sistem pengukuran kinerja membutuhkan kemauan politik dari semua pihak, mulai dari presiden, menteri, hingga pemerintah daerah. Diperlukan perubahan prosedur dan peraturan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Diperlukan sistem dan alat ukur yang tepat untuk mengukur hasil program dan kegiatan. Membangun kapabilitas pemerintah daerah dan lembaga dalam mengelola anggaran berbasis hasil. Solusi yang akan dilakukan untuk saat ini adalah melakukan perubahan secara bertahap, dimulai dari 50% anggaran yang diukur berdasarkan hasil, memperkuat kemauan politik dan komitmen dari semua pihak,

menyempurnakan undang-undang dan peraturan terkait pengukuran kinerja anggaran, membangun sistem dan alat ukur yang tepat untuk mengukur hasil program dan kegiatan, meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dan lembaga dalam mengelola anggaran berbasis hasil. Oleh karena itu untuk mengubah sistem pengukuran kinerja anggaran dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan anggaran di Indonesia. (CNBC Indonesia, 2023, Hasil Belanja APBN-APBD Bikin Jokowi Kecewa, Apa yang Salah?).

Pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi bertanggung jawab untuk mengelola PAD dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain sebagainya. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa PAD dapat dioptimalkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, target PAD yang sering tidak tercapai, seperti pada tahun 2018 (88,09%), 2019 (89,47%), 2020 (80%), 2021 (85%), dan 2022 (86%). Kedua, sumber PAD masih didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan retribusi daerah dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan. Ketiga, terdapat dugaan kebocoran PAD akibat lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak dan praktik suap dan pungli. Keempat, biaya penagihan PAD tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, namun efektivitasnya masih rendah. Kelima, penggunaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi belum optimal, dengan inefisiensi dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah. Keenam, kapasitas dan kapabilitas SDM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi perlu ditingkatkan. Ketujuh, sistem dan prosedur penagihan PAD masih belum memadai. Berikut merupakan tabel dari PAD Kabupaten Bekasi:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2018	1.999.379.579.774	2.094.369.342.687
2019	2.146.860.817.035	2.439.368.558.406

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2020	2.177.501.261.546	2.384.139.484.622
2021	2.530.308.191.012	2.544.241.752.320
2022	2.375.839.110.815	2.537.947.670.960

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (2024)

Permasalahan-permasalahan tersebut menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan PAD dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan PAD dan mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan masalah di atas, pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan bahwa dana yang ada digunakan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan keuangan pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif. Namun, masalahnya adalah seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah. Dorongan untuk meningkatkan pendapatan daerah, akuntabilitas, dan transparansi serta meningkatkan pengetahuan tentang keuangan daerah mendorong penelitian ini. Meskipun Kabupaten Bekasi memiliki potensi pendapatan yang sangat besar, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sebaliknya, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu menemukan hal-hal yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas keuangan daerah, membantu membuat saran untuk meningkatkan pendapatan daerah, akuntabilitas, dan transparansi, dan membantu mengembangkan pengetahuan tentang keuangan daerah. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, target PAD Kabupaten Bekasi belum tercapai secara optimal pada tahun 2018-2022.

2. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bekasi.
3. Kurangnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Terdapat inefisiensi dalam penggunaan anggaran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel yaitu efisiensi dan efektivitas.
2. Kabupaten atau kota yang dipilih sebagai sampel adalah Kabupaten Bekasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2018-2022.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dalam mencapai target PAD?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dalam mengelola keuangan daerah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi?
4. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian Analisis Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dalam mencapai target PAD.

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dalam mengelola keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti:

1. Bagi penulis

Penulis memperoleh manfaat menambah pengetahuan dalam memahami analisis efektivitas dan efisiensi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait analisis efektivitas dan efisiensi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Bekasi.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal metodologi penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti:

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.